

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya merupakan sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses ini tidak hanya menyentuh ranah ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya yang saling berkaitan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Secara lebih spesifik, pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk memperbaiki kondisi ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya dan produktivitas, sehingga mampu menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Kamandanu, 2022). Namun, membatasi pembangunan hanya pada pertumbuhan ekonomi tentu terlalu sempit, karena hakikat pembangunan jauh lebih luas dan bersifat menyeluruh.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan tidak lagi hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, dan produktif. Dalam kerangka tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting yang menggambarkan capaian pembangunan manusia suatu wilayah. Peningkatan IPM mencerminkan keberhasilan kebijakan publik dalam mewujudkan kesejahteraan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Salah satu instrumen penting untuk menilai sejauh mana kemajuan

pembangunan manusia tercapai adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari tingginya pendapatan domestik bruto (PDB), tetapi juga dari kemampuan suatu negara meningkatkan kualitas manusia melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tiga dimensi utama IPM pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak menjadi dasar untuk menilai kualitas sumber daya manusia. Integrasi ketiga elemen ini menentukan sejauh mana masyarakat dapat berkembang.

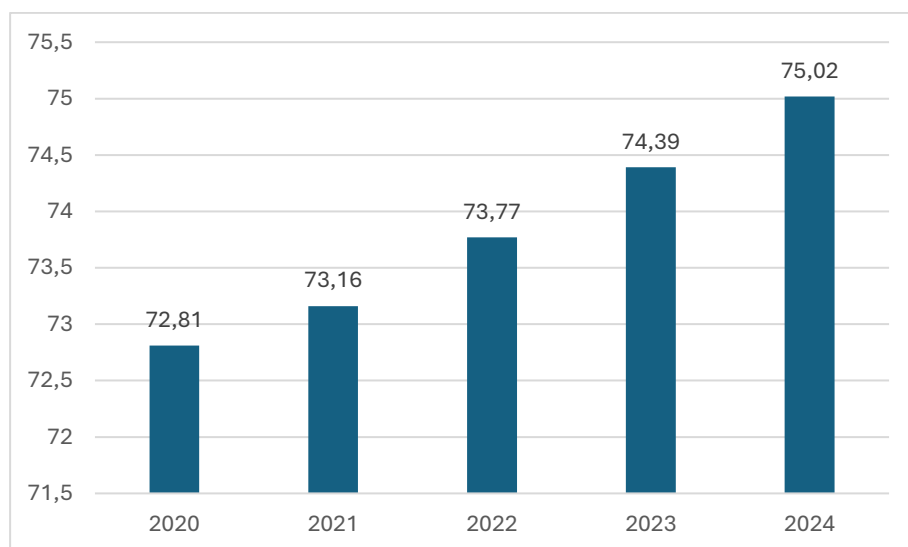
Pemerintah berupaya mewujudkannya melalui kebijakan fiskal dan pengalokasian anggaran yang diarahkan untuk memperluas akses layanan publik esensial, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Kedua sektor ini menjadi pilar penting dalam struktur belanja negara maupun daerah, karena langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meski demikian, capaian antarwilayah masih menunjukkan variasi yang cukup besar, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti efisiensi pengelolaan anggaran, tingkat korupsi, serta kondisi geografis (Susilawati & Syukri, 2025).

Meskipun pemerintah telah berupaya maksimal dalam mengalokasikan anggaran bagi pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Masih muncul pertanyaan tentang seberapa efektif kebijakan tersebut dalam benar-benar meningkatkan IPM. Perbedaan hasil antarwilayah menandakan adanya ketidakefisienan atau faktor-faktor eksternal lain yang belum banyak dikaji secara mendalam. Karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang dapat menguji hubungan kausal antara anggaran pendidikan, kesehatan, dan PDRB

per kapita terhadap IPM secara empiris

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat posisi IPM Indonesia yang masih berada pada kategori menengah, yakni sekitar 0,72 pada tahun 2023 menurut laporan UNDP dan masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN seperti Malaysia 0,81 dan Singapura 0,94. Dampak pandemi COVID-19 juga menambah tantangan, terutama karena menurunnya indikator kesehatan dan pendidikan di banyak daerah. Bukti empiris yang menunjukkan efektivitas alokasi anggaran terhadap peningkatan IPM menjadi sangat penting. Tanpa pemahaman yang lebih baik, risiko pemborosan anggaran dan ketimpangan pembangunan akan terus berlanjut, sehingga menghambat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis sejauh mana anggaran pendidikan, kesehatan, dan PDRB per kapita memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2020-2024



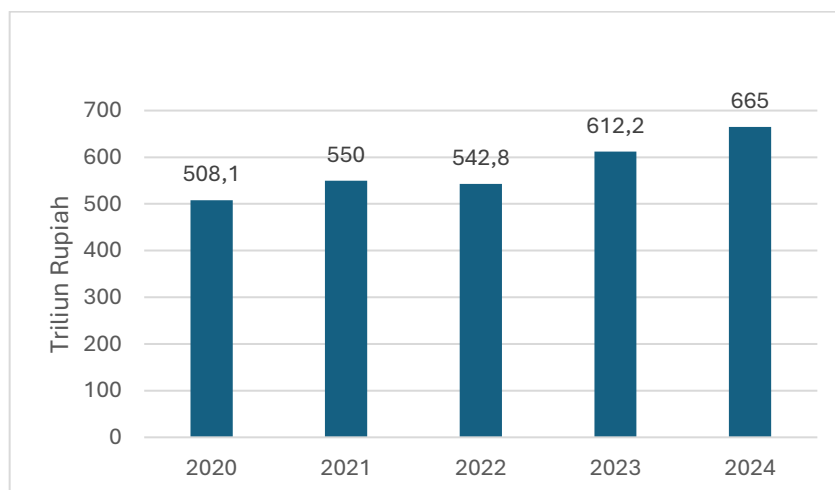
Sumber: Data di olah (2025)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020-2024, IPM di Indoneesia terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Berdasarkan data pada grafik, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus mengalami peningkatan dari lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai IPM tercatat sebesar 72,81, kemudian naik sedikit menjadi 73,16 pada tahun 2021. Walaupun kenaikannya relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tetap berlanjut meskipun pada periode tersebut Indonesia menghadapi dampak pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2022, nilai IPM meningkat menjadi 73,77, menandakan adanya pemulihan dari sisi kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Tren positif ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, di mana IPM naik menjadi 74,39 pada tahun 2023, dan kembali meningkat cukup signifikan menjadi 75,02 pada tahun 2024. Namun kesenjangan antarprovinsi juga masih lebar, IPM DKI Jakarta mencapai 81,92, sedangkan Papua hanya 61,22 pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakefektifan penggunaan anggaran publik dan lemahnya pemerataan hasil pembangunan antarwilayah. Padahal, di era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam mengelola belanja publik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia dan secara berkala mempublikasikannya dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*) (BPS, 2023). IPM diperkenalkan sebagai alat untuk mengukur prestasi dalam dimensi inti pembangunan manusia di berbagai

negara. Sebagai indikator kualitas hidup, IPM didasarkan pada tiga dimensi pokok, antara lain harapan hidup yang sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Bilamana suatu negara belum bisa dikatakan berhasil apabila hanya dilihat dari besarnya pendapatan produk domestik bruto tanpa adanya peningkatan pembangunan manusianya, dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakatnya. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia nya dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perkapitanya. Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan penting yang berkaitan dengan distribusi pendapatan masyarakat. Semakin tinggi ketimpangan, semakin besar perbedaan ekonomi yang terjadi, terutama berdampak pada kelompok berpendapatan rendah (Indah Sukma Dewi, Junaidi, 2024).

Gambar 1.2 Realisasi Dana Pendidikan di Indonesia (Triliun Rupiah)
2020-2024



Sumber: Data di olah, (2024)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas anggaran pendidikan di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat dengan beberapa fluktuasi kecil. Berdasarkan data, pada tahun 2020 pemerintah mengalokasikan

sekitar Rp508,1 triliun untuk sektor pendidikan. Angka ini kemudian naik menjadi Rp550 triliun pada tahun 2021, di mana sebagian besar digunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh selama pandemi, penyediaan bantuan kuota internet, serta subsidi bagi tenaga pendidik. Meski pada tahun 2022 sempat turun sedikit menjadi Rp542,8 triliun, pemerintah kembali menaikkan anggaran pendidikan menjadi Rp612,2 triliun pada tahun 2023, dan meningkat lagi menjadi Rp665 triliun pada tahun 2024.

Perubahan anggaran ini membawa dampak yang cukup terasa terhadap pembangunan manusia, khususnya dalam dimensi pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data BPS, indikator pendidikan seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. HLS meningkat dari sekitar 12,95 pada 2020 menjadi 13,20 tahun pada 2023, sedangkan RLS naik dari 8,48 tahun menjadi 8,63 tahun pada periode yang sama. Artinya, semakin banyak anak Indonesia yang memiliki kesempatan untuk bersekolah lebih lama dan menyelesaikan pendidikan mereka. Hal ini juga berdampak positif pada kenaikan IPM nasional, yang terus meningkat dari 72,81 pada 2020 menjadi 74,39 pada 2023, dan mencapai 75,02 pada 2024.

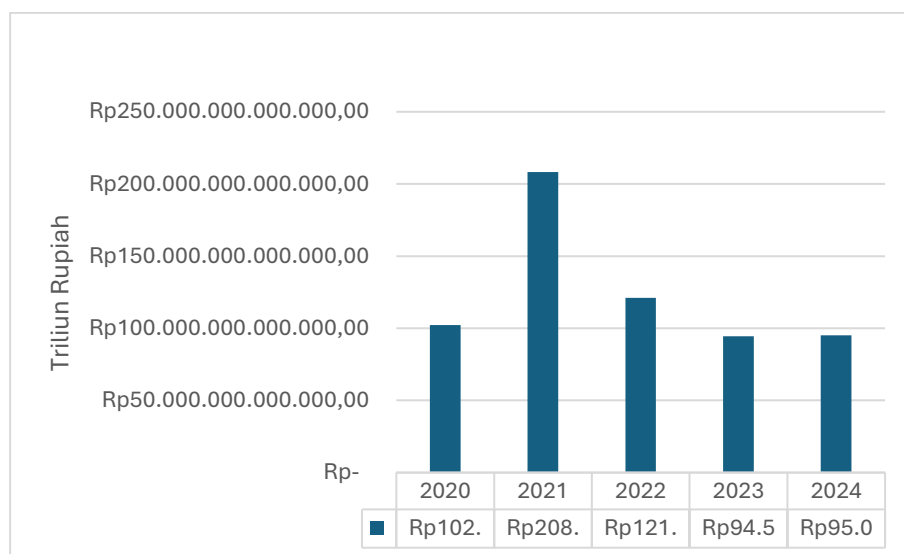
Walaupun realisasi dana alokasi pendidikan Indonesia secara nasional menunjukkan peningkatan dari Rp 508,1 triliun di 2020 hingga Rp 665 triliun di 2024, angka-angka itu belum menjamin bahwa setiap provinsi memberikan prioritas belanja pendidikan secara merata. Misalnya, provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 memiliki alokasi belanja pendidikan sebesar Rp 3.172,58

Triliun, dengan capaian IPM tertinggi 84,15. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur dengan anggaran pendidikan mencapai Rp 16.180,02 triliun hanya mencapai IPM 75,35. Lebih kontras lagi, Provinsi Papua Barat mengalokasikan belanja pendidikan sekitar Rp 786,59 miliar IPM nya masih terendah, yakni 67,69.

Ketidakmerataan ini memperlihatkan bahwa meskipun dukungan dana pusat meningkat, kapasitas daerah dalam menyerap dan menggunakan dana pendidikan belum merata. Secara keseluruhan, meskipun dana pendidikan nasional terus naik, belum semua daerah bisa memanfaatkan dana tersebut secara optimal. Karena itu, penting untuk memahami apa yang membuat beberapa daerah mampu memprioritaskan pendidikan lebih baik daripada yang lain, agar kualitas sumber daya manusia bisa meningkat secara merata di seluruh Indonesia.

Gambar 1.3 Realisasi Dana Sektor Kesehatan di Indonesia (Triliun Rupiah)

Tahun 2020-2024



Sumber: Data di olah (2025)

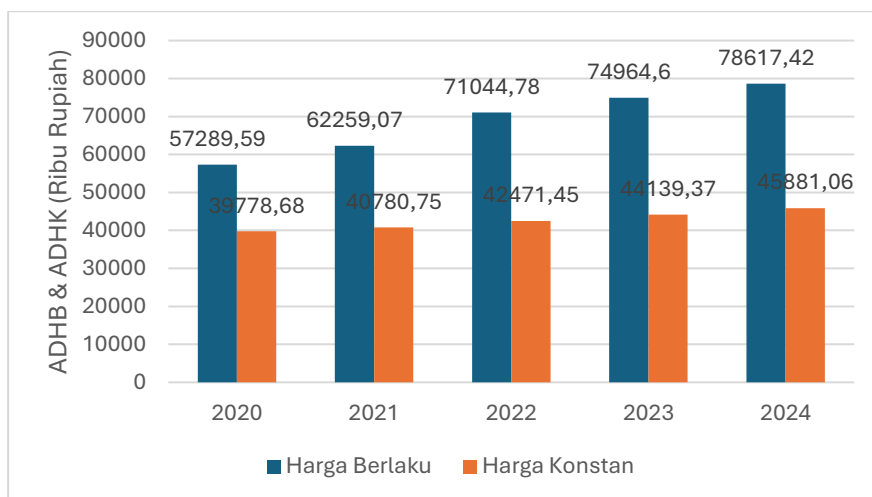
Berdasarkan gambar 1.3 diatas anggaran sektor kesehatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup mencolok. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI, 2025), realisasi anggaran kesehatan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp102,20 triliun, lalu meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi Rp208,31 triliun. Lonjakan ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat pemerintah perlu mengalokasikan dana besar untuk penanganan kesehatan masyarakat, seperti pengadaan vaksin, alat medis, hingga insentif bagi tenaga kesehatan. Setelah situasi pandemi mulai terkendali, anggaran kesehatan kembali turun menjadi Rp121,05 triliun pada 2022, kemudian Rp94,57 triliun pada 2023, dan Rp95,08 triliun pada 2024.

Kenaikan besar pada tahun 2021 ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di berbagai daerah. Rumah sakit diperbaiki, tenaga kesehatan diperbanyak, dan fasilitas penunjang kesehatan masyarakat juga ditingkatkan. Peningkatan layanan ini secara tidak langsung turut mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada dimensi kesehatan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), IPM Indonesia pada tahun 2020 berada di angka 72,81 lalu naik menjadi 73,16 pada tahun 2021. Peningkatan sebesar 0,35 poin tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Indonesia mulai membaik setelah pandemi. Dengan pemanfaatan anggaran pemerintah yang tepat, khususnya untuk sektor kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh dapat ditingkatkan. Kondisi kesehatan yang baik ini membuka

peluang lebih besar untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi secara efektif. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Mengutip temuan penelitian (Resmarani & Sishadiyati, 2023) di Yogyakarta, peningkatan IPM secara signifikan didorong oleh pengembangan layanan kesehatan. Penelitian tersebut memperkuat hipotesis bahwa layanan kesehatan yang lebih memadai berkontribusi pada tingkat IPM yang lebih berkualitas. Namun sebagai contoh pada tahun 2024 pada Provinsi DKI Jakarta memiliki alokasi belanja kesehatan Rp 3,60 miliar, dengan capaian IPM tertinggi 84,15. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur dengan anggaran kesehatan Rp 2.658,69 triliun hanya mencapai IPM 75,35. Lebih kontras lagi, Provinsi Papua Barat mengalokasikan belanja kesehatan Rp 333.14 miliar IPM nya masih terendah, yakni 67,69.

Gambar 1.4 PDRB Per Kapita Indonesia (Ribu Rupiah) Tahun 2020-2024



Sumber: Data di olah (2025)

Berdasarkan data pada gambar 1.4 di Berdasarkan grafik tersebut, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Indonesia menunjukkan

peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp57.289,59 ribu, lalu meningkat menjadi Rp62.259,07 ribu pada 2021, dan terus naik hingga mencapai Rp78.617,42 ribu pada 2024. Sementara itu, pada harga konstan juga terjadi peningkatan dari Rp39.778,68 ribu pada 2020 menjadi Rp45.881,06 ribu pada 2024. Kenaikan ini menggambarkan bahwa daya beli dan pendapatan masyarakat Indonesia terus membaik selama periode 2020-2024. Pertumbuhan tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat setelah pandemi,

Kenaikan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup konsisten pascapandemi, yang mencerminkan peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, serta daya beli masyarakat. Meski demikian, peningkatan PDRB per kapita belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang merata. Masih terdapat tantangan dalam pemerataan distribusi pendapatan antarwilayah dan kelompok masyarakat, yang menjadi perhatian penting dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Provinsi dengan basis ekonomi kuat seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan rata-rata PDRB per kapita DKI Jakarta sebesar 464.651,95 didorong oleh sektor industri, pertambangan, dan jasa. Sebaliknya, wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur masih mencatatkan angka PDRB per kapita yang lebih rendah, yakni pada NTT rata-ratanya sebesar 34.110,144 meski tetap menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Ketimpangan ini

menggambarkan masih adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pemerataan pembangunan. Dengan demikian, meskipun secara nasional PDRB per kapita terus meningkat sebagai tanda pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerataan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi tantangan utama yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam menilai seberapa efektif anggaran pendidikan, kesehatan, dan PDRB per kapita terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diperlukan sejumlah indikator yang tidak hanya menyoroti besar kecilnya anggaran, tetapi juga bagaimana dana tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu cara untuk mengukurnya adalah melalui rasio realisasi anggaran pendidikan terhadap jumlah siswa atau sekolah, yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan dana. Selain itu, indikator kualitas pendidikan seperti Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH) Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Putus Sekolah (APS) juga menjadi cerminan sejauh mana anggaran pendidikan memberikan hasil di lapangan.

Di sektor kesehatan, efektivitas dapat dilihat dari rasio realisasi anggaran kesehatan terhadap Angka Harapan Hidup (AHH) yang menjadi indikator utama dalam IPM, terdapat sejumlah indikator pelengkap yang dapat menggambarkan dimensi kesehatan masyarakat, seperti Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan prevalensi stunting, Indikator-indikator ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang akses,

kualitas, dan efektivitas sistem kesehatan, sehingga memperkuat analisis efektivitas pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan IPM, yang menggambarkan sejauh mana dana kesehatan digunakan untuk memperluas akses serta meningkatkan mutu pelayanan. Angka harapan hidup juga menjadi salah satu output langsung dari efektivitas anggaran kesehatan karena mencerminkan hasil dari layanan dan fasilitas yang tersedia.

PDRB per kapita berfungsi sebagai indikator ekonomi penting yang menunjukkan kemampuan daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, di mana efektivitasnya dapat dilihat dari keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM (Mukhlis, 2021). Tak kalah penting, aspek pemerataan antarwilayah juga perlu diperhatikan dengan meninjau perbedaan capaian IPM dan realisasi anggaran antar provinsi atau kabupaten/kota untuk mengetahui apakah anggaran telah digunakan secara merata atau hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Efektivitas diukur secara empiris melalui signifikansi dan arah pengaruh belanja pendidikan dan kesehatan terhadap IPM dalam model regresi data panel. Jika peningkatan belanja pada sektor tertentu secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, maka dapat dikatakan pengeluaran tersebut efektif dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Sebaliknya bila tidak signifikan, berarti ada indikasi inefisiensi atau alokasi yang belum optimal, meskipun nominalnya besar.

Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan peningkatan efektivitas dan kebersihan

penggunaan anggaran dalam rangka mendorong pelayanan publik dan pertumbuhan daerah. Salah satu kebijakan kunci adalah peninjauan dan penyesuaian alokasi transfer ke daerah (DBH/DAK/DAU) agar lebih tepat sasaran terhadap kebutuhan daerah. Termasuk layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong penyerapan anggaran yang lebih cepat dan produktif untuk meningkatkan PDRB per kapita. Pendekatan kebijakan ini relevan bagi penelitian efektivitas pengeluaran karena perubahan mekanisme alokasi dan penekanan pada penyerapan anggaran dapat memengaruhi hubungan antara besaran belanja sektoral (pendidikan/kesehatan) dan output pembangunan seperti PDRB per kapita.

Fenomena dana pemerintah daerah yang masih tersimpan di perbankan menjadi perhatian serius bagi Kementerian Keuangan karena kondisi ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan anggaran, terutama di sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Kemenkeu terus mendorong pemerintah daerah agar mempercepat pelaksanaan belanja yang produktif, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengeluaran publik tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut mampu diserap dan dimanfaatkan secara optimal. Ketika belanja daerah berjalan lambat, manfaatnya terhadap peningkatan PDRB per kapita, mutu pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, percepatan penyerapan anggaran serta penataan kebijakan fiskal daerah

menjadi kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan agar setiap kebijakan fiskal tidak hanya fokus pada penyerapan jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada jangka panjang. Peraturan tentang dana transfer ke daerah disusun untuk memastikan adanya kejelasan, keadilan, dan transparansi dalam pembagian serta pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif. Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, UU ini menjadi payung hukum terbaru yang mengatur hubungan keuangan pusat-daerah termasuk definisi dan mekanisme penyaluran dana transfer ke daerah (Republik, 2022). Dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, PP ini memperbarui regulasi teknis pelaksanaan TKD, mendetailkan jenis-jenis dana transfer dan bagaimana alokasi & penyalurannya dikelola (Republik, 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu masih menyisakan beberapa celah penting. Sebagian besar menggunakan data sebelum tahun 2020 sehingga belum mencerminkan kondisi pasca-pandemi dan dampak desentralisasi fiskal. Selain itu, banyak studi hanya menyoroti besarnya alokasi anggaran tanpa melihat efisiensi dan pemerataan penggunaannya. penelitian (Ananda et al., 2021) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), namun fokus analisisnya terbatas pada besaran alokasi anggaran tanpa meninjau aspek efisiensi atau pemerataan pemanfaatannya. Berbeda dari studi tersebut, penelitian ini dilakukan pada masa kepemimpinan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, ketika pemerintah mulai menekankan percepatan penyerapan anggaran dan efisiensi belanja daerah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menilai besar pengeluaran pada sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga meninjau bagaimana efektivitas penggunaannya berpengaruh terhadap peningkatan IPM di era kebijakan fiskal. Penelitian sebelumnya juga jarang membahas pengaruh desentralisasi fiskal serta perbedaan kapasitas fiskal antar wilayah yang memengaruhi efektivitas anggaran. Di sisi lain, PDRB per kapita umumnya hanya dijadikan variabel kontrol, padahal indikator ini penting untuk melihat kemampuan ekonomi daerah dalam mengoptimalkan anggaran publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan yang membuatnya relevan dengan kondisi saat ini. Analisis difokuskan pada periode 2020-2024, mencakup masa pandemi hingga pasca-pandemi, sehingga mampu menggambarkan dinamika kebijakan anggaran daerah dalam menghadapi krisis dan pemulihan ekonomi. Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini tidak hanya menilai besarnya anggaran, tetapi juga berupaya menilai perbedaan efektivitas antarprovinsi dan mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang memengaruhi keberhasilan pembangunan manusia. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan konteks desentralisasi fiskal dan variasi antar provinsi dengan menggunakan analisis data panel EViews, sehingga dapat melihat

perbedaan efektivitas antarwilayah. PDRB per kapita juga ditempatkan sebagai variabel utama yang mencerminkan kapasitas ekonomi daerah dalam mengelola anggaran publik secara optimal.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas anggaran pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia selama periode 2020-2024, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, kualitas, dan pemerataan antarwilayah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji pengaruh PDRB per kapita terhadap peningkatan IPM serta interaksinya dengan alokasi anggaran publik di era desentralisasi fiskal. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan efektivitas penggunaan anggaran antarprovinsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan dan kesehatan agar lebih tepat sasaran serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti terkait efektivitas anggaran kesehatan, pendidikan, dan PDRB per kapita di era desentralisasi fiskal menggunakan analisis data panel EViews dengan judul *“EFEKTIVITAS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA DI ERA DESENTRALISASI FISKAL”*

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Indonesia?
2. Apakah pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Indonesia?
3. Apakah PDRB per kapita berpengaruh terhadap peningkatan IPM di Indonesia?
4. Apakah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan PDRB per kapita secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan IPM di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis pengaruh anggaran pendidikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2020-2024
2. Untuk menganalisis pengaruh anggaran kesehatan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2020-224
3. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2020-2024

4. Untuk menganalisis pengaruh simultan antara anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan PDRB per kapita terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di era desentralisasi fiskal

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai hubungan antara anggaran publik, PDRB per kapita, dan pembangunan manusia dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi pembangunan, khususnya yang berfokus pada efektivitas pengelolaan anggaran daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana kebijakan fiskal di bidang pendidikan dan kesehatan dapat memengaruhi dimensi-dimensi pembentuk IPM. Penelitian ini juga memperkuat konsep bahwa pertumbuhan pembangunan manusia dapat dijelaskan melalui integrasi antara *Human Capital Theory* dan *Endogenous Growth Theory*, di mana investasi pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berperan sebagai faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi pembuat kebijakan, terutama pemerintah pusat dan daerah, dalam merumuskan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Penelitian ini juga dapat

menjadi alat evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menilai apakah alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan telah digunakan secara optimal untuk mendorong peningkatan IPM, serta membantu dalam menentukan prioritas belanja yang paling berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi lembaga legislatif dan pengawas anggaran untuk menilai efektivitas desentralisasi fiskal, sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik dan bagaimana kebijakan fiskal yang efektif dapat menciptakan pemerataan pembangunan manusia di seluruh wilayah Indonesia.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus, tidak menyimpang dan tidak meluas dari tujuan awal yang telah direncanakan sebelumnya, maka penulis menetapkan batasan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, ruang lingkup penelitian akan memiliki batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada tiga variabel independen, yaitu pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, dan PDRB per kapita terhadap IPM di Indonesia.
2. Data yang digunakan merupakan data sekunder dalam rentang waktu 2020-2024, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.

3. Analisis dilakukan pada tingkat provinsi di Indonesia, sehingga hasilnya menggambarkan kondisi makro daerah, bukan tingkat kabupaten/kota.
4. Alat analisis yang digunakan adalah EViews dengan pendekatan data panel untuk melihat pengaruh baik secara parsial maupun simultan antar variabel.
5. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor non fiskal lainnya, seperti aspek sosial, politik, atau lingkungan, yang juga dapat memengaruhi IPM namun berada di luar fokus kajian ini.